

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM *ONLINE*  
*SINGLE SUBMISSION* DI DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN  
OGAN ILIR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh:**

**FRENKKY DIMAR**

**07011282025126**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA 2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ONLINE SINGLE SUBMMISION  
(OSS) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN OGAN ILIR**

**USULAN PENELITIAN**

**Diajukan Oleh:**

**FRENKKY DIMAR  
NIM. 07011282025126**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Februari, 2024

**Pembimbing**

**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si  
NIP. 196511171990031004**



Mengetahui,  
Ketua Jurusan



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001**

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WEBSITE ONLINE SINGLE  
SUBMISSION DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU (DPMPTSP)  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
FRENKKY DIMAR  
NIM. 07011282025126**

**Telah dipertahankan di depan penguji  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
pada tanggal 11 Juli 2024**

**Pembimbing :**

**Dr. Ardiyan Saptawan.,M.Si  
NIP. 196511171990031004**

**Tanda Tangan**



**Penguji :**

**Dr Lili Erina.,M.Si  
NIP. 196612301992032001**

**Tanda Tangan**



**Junaidi, S.IP., M.Si  
NIP. 197603092008021009**



**Mengetahui**

**Dekan FISIP UNSRI,**  
  
**Prof. Dr. Alfitri, M.Si.  
NIP. 196601221990031004**

**Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Publik**  
  
**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos. M.PA.  
NIP. 196911101994011001**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Seberapa pun terpuruk nya Anda di hari kemarin masih ada harapan untuk membalikkan keadaan dan berada di puncak”

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:**

- 1. Kedua Orang tua Saya, Jufri Ady  
dan Ibu Marhama Wati**
- 2. Saudari Saya, Jihan Nadiyah**
- 3. Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP  
Universitas Sriwijaya**
- 4. Rekan Seperjuangan Administrasi  
Publik Angkatan 2020**
- 5. Almamater Tercinta**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Frenkky Dimar

NIM : 070112820250126

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi kebijakan sistem online single submission di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Ilir" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Indralaya, 29 Juni 2024

  
Frenkky Dimar

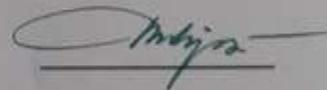
## ABSTRAK

Tujuan skripsi ini untuk mengetahui Implementasi kebijakan sistem *Online Single Submission* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Ilir. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Data yang didapat dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan website OSS belum mencapai target yang sesuai dengan tujuan dibuatnya OSS yaitu mempermudah para pelaku usaha melakukan perizinan usaha secara mandiri, yang dapat dilihat dari persentase pembuatan izin yang dilakukan para pelaku usaha secara mandiri dan menggunakan bantuan pegawai DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir. Peneliti merekomendasikan perlu diperbanyak nya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis secara merata di wilayah Kabupaten Ogan Ilir agar para pelaku usaha lebih mengenal dan mengetahui peran, fungsi dan cara penggunaan website *Online Single Submission*.

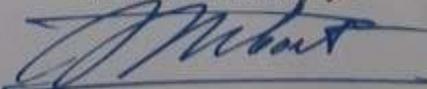
**Kata kunci :** Implementasi, Kebijakan, *Online Single Submission*

**Pembimbing**

**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si**  
NIP. 196511171990031004



Palembang, 3 Juli 2024  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Sriwijaya



**DR. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

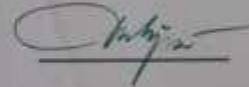
## **ABSTRACT**

*The aim of this thesis is to determine the implementation of the Online Single Submission system policy at the Ogan Ilir Regency Investment and One-Stop Integrated Services Service (DPMPTSP). The method used in this thesis is qualitative with descriptive analysis. The data obtained was analyzed by reducing the data, presenting the data, condensing the data, and drawing conclusions. The research results show that the implementation of the OSS website policy has not achieved the target in accordance with the aim of creating the OSS, namely making it easier for business actors to carry out business licensing independently, which can be seen from The percentage of permits made by business actors independently and using the assistance of Ogan Ilir Regency DPMPTSP employees. The researcher recommends that there be a need to increase socialization activities and technical guidance evenly in the Ogan Ilir Regency area so that business actors are more familiar with and know their role, function and how to use them. Online Single Submission website.*

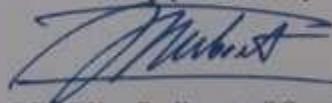
**Keywords:** *Implementation, Policy, Online Single Submission*

### **Advisor**

Dr. Ardivan Saptawan, M.Si  
NIP. 196511171990031004



Palembang, 3 July 2024  
Head of Department of public Administration  
Faculty of Social and Political Administration  
Sriwijaya University



DR. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, nikmat dan juga hidayah-Nya dalam proses penyusunan dan juga penulisan skripsi ini. Penyusunan proposal skripsi merupakan salah satu kewajiban yang harus ditempuh dalam Program Studi S1 Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan proposal skripsi ini tentunya banyak pihak yang telah membimbing, membantu, mengarahkan, dan mendukung penulis.

Puji syukur penulis hantarkan kepada keluarga tersayang terutama orang tua dan Adik, yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, serta dukungan penuh secara batin dan material kepada saya selama ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Prof. Dr. Taufik Marwa, SE. M.Si, sebagai Rektor Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku dosen pembimbing KKA serta skripsi saya yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk arahan, masukan dan motivasi.
5. Aulia Utami Putri S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing akademik perkuliahan.

6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu segala bentuk ilmu selama di bangku perkuliahan.
7. Seluruh Staf bagian Akademik dan Kemahasiswaan FISIP Universitas Sriwijaya.
8. Teman-teman Ilmu Administrasi Publik 2020 yang sedang sama-sama berjuang dan menghadapi lika-liku selama proses perkuliahan.
9. Seluruh pihak terlibat yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah dengan tulus dan ikhlas dalam memberikan kontribusi berupa doa dan dukungan selama proses pengerjaan laporan pengerjaan skripsi.

Dalam penulisan usulan penelitian ini penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan, maupun penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, semua laporan skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi untuk semua orang khususnya untuk para pembaca.

Palembang, 3 juli 2024

**Frenkky Dimar**

**NIM. 07011282025126**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat .....	9
1.4.1 Secara teoritis.....	9
1.4.2 Secara praktis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
2.1 Landasan Teori.....	12

	x
2.1.1 Kebijakan Publik .....	12
2.1.2 Implementasi Kebijakan .....	13
2.1.3 Model Implementasi Kebijakan .....	14
2.1.4 <i>Online Single Submission (OSS)</i> .....	19
2.1.5 Teori Implementasi Yang Digunakan Dalam Penelitian .....	20
2.1.6 Alasan Memilih Teori Implementasi Ripley dan Fraklin .....	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka berpikir.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Definisi konsep .....	38
3.2.1 Implementasi.....	39
3.2.2 <i>Online Single Submission (OSS)</i> .....	39
3.2.3 Kebijakan publik.....	39
3.3 Fokus penelitian .....	39
3.4 Jenis dan Sumber data .....	41
3.5 Informasi penelitian .....	41
3.5.1 Informan Kunci ( <i>Key Informan</i> ).....	41
3.5.2 Informan Tambahan .....	42
3.6 Teknik dan pengumpulan data.....	42

	xi
3.6.1 Observasi.....	42
3.6.2 Wawancara.....	42
3.6.3 Dokumentasi .....	42
3.7 Teknik analisis data.....	43
3.7.1 Reduksi data.....	43
3.7.2 Penyajian Data .....	43
3.7.3 Penarikan Kesimpulan .....	44
3.8 Jadwal penelitian.....	45
3.9 Sistematika Penulisan.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Gambaran Umum lokasi penelitian.....	49
4.1.1 Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Ogan Ilir .....	49
4.1.2 Letak Geografis DPMPTSP Ogan Ilir .....	50
4.1.3 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir .....	50
4.1.4 Tugas pokok Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu kabupaten Ogan Ilir.....	52
4.1.5 Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir .....	52
4.1.6 Struktur Organisasi .....	54
4.2 Deskripsi Informan penelitian .....	56
4.3 Implementasi Kebijakan Sistem <i>Online Single Submission</i> Di Dinas	

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Ilir .....	56
4.3.1 Kepatuhan .....	57
4.3.2 Pelaksanaan Rutinitas dan Fungsi .....	62
4.3.3 Hasil dan dampak .....	64
4.4 Faktor yang menjadi kendala.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN4 .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014-2018 .....	6
Tabel 1.2 Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019-2021 Menggunakan Sistem OSS.....	7
Tabel 1.3 Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang Membuat Secara Mandiri dan Menggunakan Bantuan Staf DPMPTSP menggunakan website OSS .....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	41
Tabel 3.2 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 4.1 Informan Penelitian .....	56
Tabel 4.2 Daftar Pegawai Bidang Perizinan .....	61
Tabel 4.3 Pegawai yang Terlibat Dalam Pelaksanaan OSS.....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi kebijakan menurut Meter dan Horn .....	16
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Edward III .....	17
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir .....	17
Gambar 4.1 Kantor DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir .....	49
Gambar 4.2 Visi dan Misi DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir .....	52
Gambar 4.3 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir .....	55
Gambar 4.4 Alur Pelayanan OSS .....	58
Gambar 4.5 Daftar Perizinan dan non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir .....	61
Gambar 4.6 Target Realisasi Investasi Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan .....	66
Gambar 4.7 Sosialisasi DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir .....	68

## DAFTAR SINGKATAN

OSS	: <i>Online Single Submission</i>
DPMPTSP	: Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
OI	: Ogan Ilir
SOP	: Standar operasional Prosedur
APBD	: Anggaran pemerintah daerah
DAK	: Dana alokasi khusus
BIMTEK	: Bimbingan teknis
ASN	: Aparatur sipil Negara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia telah masuk pada Era digitalisasi dimana seluruh informasi dapat diakses kapan pun dan dimana pun oleh semua manusia. Manusia sebagai pelaku utama dalam mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang serasi dengan cita cita negara sudah semestinya memiliki kompetensi untuk menjawab pesatnya perkembangan zaman agar mampu bersaing di Era digitalisasi yang sudah masuk di Indonesia. Sistem Pemerintahan yang sesuai dengan harapan antara pemerintah dan masyarakatnya mendorong terjadinya penyelenggaraan program pemerintah. E-Government merupakan istilah yang sering digunakan masyarakat umum untuk menyebut perkembangan teknologi berbasis elektronik dalam sistem pemerintahan sebagian besar negara di dunia terutama di Indonesia. Dalam rangka mendorong efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik, *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam prosedur pemerintahan. Media sosial merupakan salah satu contoh teknologi informasi dan komunikasi yang dapat berfungsi sebagai saluran atau jembatan antara negara dan rakyat.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bahwa hal ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperluas kesempatan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Dengan merampingkan layanan, pemerintah menunjukkan bahwa mereka lebih peduli terhadap masyarakat. Kemampuan PTSP untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan, penyelesaian pelayanan

waktu dan biaya tidak melebihi ketentuan peraturan, kejelasan prosedur, surat-surat untuk mengisi permohonan izin yang sama dapat dikurangi, untuk mikro, kecil dan Usaha menengah (UMKM) dibebaskan dari biaya perizinan, serta kemudahan dalam mengakses informasi pelayanan kepada masyarakat, menjadi salah satu simplifikasi yang diterapkan. Semua bentuk penyederhanaan tersebut dalam rangka mendorong kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Peraturan yang telah diulas sebelumnya membuktikan bahwa pelayanan perizinan berusaha di Indonesia telah mulai ditata secara terstruktur. Peraturan tersebut menyebabkan pelayanan perizinan berusaha secara bertahap menuju ke jenjang yang lebih baik. Perbedaan tersebut bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha melakukan kegiatan pelayanan perizinan khususnya pelayanan perizinan berusaha. Tetapi, ternyata dari semua peraturan tersebut belum dapat membawa perubahan yang memuaskan para pelaku usaha maupun pemerintah.

Menyadari percepatan pelaksanaan usaha merupakan salah satu langkah yang paling nyata dalam meningkatkan pelayanan perizinan usaha bagi pelaku usaha. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2) tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha merinci upaya pemerintah di bidang ini dan menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mempercepat pelaksanaan usaha adalah dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko *Online Single Submission* atau sistem perizinan usaha integrasi elektronik. Presiden Joko Widodo menandatangani dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Perusahaan Terintegrasi Secara Elektronik pada 21 Juni 2018 pada pasal 1 ayat 5 yang berbunyi : “ perizinan terintegritas secara elektronik atau *Online Single*

*Submission* atau yang disingkat OSS adalah peraturan yang diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama menteri, gubernur, bupati, dan Walikota, serta para pelaku usaha”, melanjutkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Penyelenggaraan Usaha. Pada intinya, PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini menekankan pada peraturan pelayanan sebelumnya yang bertujuan untuk mempersingkat prosedur yang rumit terkait dengan pengurusan izin usaha secara online untuk mencapai kemudahan dan mempercepat investasi dan usaha. Semua ini merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk memodernisasi layanan dengan memanfaatkan teknologi baru. Namun jika dilihat dari pasar, khususnya di kabupaten Ogan Ilir, masih terdapat Perusahaan Mikro, Kecil, dan Menengah yang belum memanfaatkan Internet untuk berbisnis, Pelayanan perizinan perusahaan yang terintegrasi secara elektronik merupakan salah satu sistem pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir. Landasan kebijakan *Online Single Submission* (OSS) di Ogan Ilir adalah peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir yang berbunyi : ”perizinan usaha terintegritas secara elektronik atau *Online Single Submission* selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegritas” .

OSS resmi diluncurkan pada bulan Juni 2018. Sistem ini diterapkan di seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Indonesia dalam hal kemudahan penerbitan izin usaha. Hal itu juga yang terjadi di DPMPSTP

Kabupaten Ogan Ilir. Semenjak diluncurkannya sistem OSS DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir ikut andil dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai sesuai yang tertera pada PP No.24 tahun 2018.

Dalam penerapan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kabupaten Ogan Ilir yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang disingkat DPMPTSP kabupaten Ogan Ilir. DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir memiliki peran yang sangat penting dalam penerbitan izin usaha karena hanya DPMPTSP yang bisa memberikan atau tidak memberikan surat izin legalitas berusaha kepada pelaku usaha sesuai dengan yang tertuang dalam PP No. 24 tahun 2018.

Sebagai kabupaten yang memiliki lokasi yang strategis, yaitu berada di tengah-tengah Provinsi Sumatera Selatan yang dilalui oleh jalur utama lintas Sumatera, Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu tujuan utama para investor di Provinsi Sumatera Selatan untuk berinvestasi. Investasi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2019 mencapai Rp. 85,9 Milyar rupiah dan meningkat di tahun 2020 sebesar Rp. 340 Milyar rupiah. Perubahan yang disebabkan oleh bertambahnya investasi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir membuktikan bahwa Ogan Ilir bisa menjadi kabupaten yang baik dalam berinvestasi. Kemudian dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir berperan sangat penting dalam upaya peningkatan investasi yang terjadi di Ogan Ilir. Untuk mempermudah DPMPTSP Ogan Ilir dalam menerbitkan izin usaha agar investor dapat dengan mudah berinvestasi di Kabupaten Ogan Ilir maka peran OSS sangat diperlukan dalam hal tersebut.

Adapun peran Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Ogan Ilir dalam menerapkan sistem *Online Single*

*Submission* (OSS) adalah sebagai berikut:

1. DPMPTSP memberikan pendampingan kepada pemohon yang ingin mendaftar melalui OSS, sampai mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. DPMPTSP melakukan monitoring pengawasan dan pengendalian terhadap komitmen pemohon dalam proses izin komersial/operasional.
3. DPMPTSP melakukan koordinasi dengan OPD terkait komitmen pemohon melalui OSS, apabila sudah terdaftar, DPMPTSP dapat melanjutkan proses perizinan.
4. Apabila koordinasi dengan OPD belum online, maka dapat dilakukan secara manual.
5. Izin yang tidak tertuang dalam Peraturan Pemerintah 24 tahun 2018, DPMPTSP melakukan perizinan tidak melalui sistem OSS.

Penerbitan NIB dapat menjadikan pelaku usaha lebih mudah dalam membuat perizinan. Saat ini jika pelaku usaha telah memiliki NIB maka sudah memiliki akses untuk menerima penerbitan surat izin usahanya. Karena NIB diterbitkan sebagai penyempurnaan dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

SIUP merupakan izin operasional bagi perorangan, perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang atau jasa. Usaha yang wajib memiliki SIUP adalah CV, PT, terutama BUMN. Penulis menggunakan data SIUP dalam penelitian ini dikarenakan jumlah penerbitan SIUP yang sangat signifikan perubahannya, saat menggunakan sistem

manual dan setelah menggunakan sistem OSS untuk mempercepat dalam penerbitan izin. Selain itu, dalam sistem OSS mengutamakan peningkatan izin berusaha di bidang UMK. Adapun penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari tahun 2014 sampai dengan 2018 di Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014-2018**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2014	330
2.	2015	417
3.	2016	337
4.	2017	201
5.	2018	295

*Sumber: Kabupaten Ogan Ilir*

Dari tabel jumlah penerbitan SIUP diatas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 jumlah penerbitan SIUP adalah 330 izin, kemudian mengalami peningkatan pesat pada tahun 2015 yaitu sebanyak 417 izin, namun pada tahun 2016 penerbitan SIUP mengalami penurunan sehingga hanya 337 izin yang diterbitkan. Pada tahun berikutnya yaitu 2017 jumlah penerbitan SIUP kembali mengalami penurunan menjadi 201 izin. Kemudian pada tahun 2018 SIUP yang diterbitkan mengalami peningkatan dari satu tahun sebelumnya yaitu 295 izin.

Pada tahun 2018 DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir masih melakukan adaptasi terhadap sistem OSS dan juga pada tahun tersebut masih dilakukannya pembelajaran sistem, sehingga DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir masih menggunakan

sistem manual dalam menerbitkan izin usaha. Namun hal ini tidak berlaku untuk tahun-tahun berikutnya karena DPMPTSP Ogan Ilir sudah menggunakan OSS di tahun 2019 dalam penerbitan izin usaha. Proses dalam OSS sendiri terdiri atas lima tahap yaitu registrasi, aktivasi akun, aplikasi permohonan dan mendapatkan nomor induk berusaha, pengajuan izin usaha, serta izin operasional dan izin komersial. Berikut adalah jumlah izin perdagangan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir setelah diterapkannya sistem OSS yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019-2023 Menggunakan Sistem OSS**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	146
2.	2020	71
3.	2021	52
4.	2022	87
5.	2023	121

*Sumber: DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir*

Dari data Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di DPMPTSP Ogan Ilir melalui sistem OSS dapat dilihat bahwa pada tahun pertama penerapan sistem OSS yaitu 2019 DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir menerbitkan 146 jumlah SIUP. Ini terjadi dikarenakan antusias masyarakat ketika diluncurkannya sistem OSS untuk pertama kali. Pada tahun selanjutnya yaitu di 2020 terdapat 71 jumlah SIUP yang telah diterbitkan melalui sistem OSS. Kemudian pada tahun 2021 jumlah penerbitan SIUP mengalami penurunan dengan jumlah 51 izin dan ditahun

2022 terdapat 87 jumlah SUP dan terdapat 121 SIUP yang sudah diterbitkan, jadi dari awal penggunaan website OSS di DPMPTSP Ogan Ilir yaitu 2019 hingga 2023 yang terdata sudah ada 356 surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang di buat dengan rincian 156 surat dibuat melalui website OSS dan 200 surat izin dibuat dengan bantuan staf pegawai DPMPTSP Ogan Ilir. Jika data tersebut di olah menjadi tabel maka sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang Membuat Secara Mandiri dan Menggunakan Bantuan Staf DPMPTSP menggunakan website OSS**

NO	TAHUN	Pembuatan Melalui Bantuan Staf DPMPTSP	Pembuatan Secara Mandiri	Perbandingan Persentase Pembuatan Izin Melalui OSS
1	2019	90	56	62% - 38%
2	2020	41	30	58% - 42%
3	2021	29	23	57% - 43%
4	2022	40	47	45% - 55%
5	2023	49	72	60% - 40%

*Sumber: Data Staf DPMPTSP Ogan Ilir*

Sejak OSS pertama kali digunakan di DPMPTSP Ogan Ilir pada tahun 2019 pengurusan surat izin usaha perdagangan tidak semua pelaku usaha di kabupaten Ogan Ilir membuat SIUP mereka sendiri melalui website OSS, dilihat dari tabel di atas masih banyak masyarakat pelaku usaha yang membuat SIUP mereka menggunakan bantuan staf DPMPTSP Ogan Ilir ,hal ini menunjukan bahwa meskipun peluncuran website OSS oleh pemerintah yang digunakan untuk mempermudah perizinan usaha dan meninggalkan cara lama yang rumit dan cenderung lama ternyata masih banyak yang pelaku usaha di Ogan Ilir belum mengerti bagaimana

mekanisme, fungsi, dan cara penggunaan website tersebut, maka hal inilah yang akan di teliti lebih lanjut oleh penulis untuk mengetahui hal yang menjadi kendala dalam implementasikan kebijakan website OSS ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka terdapat 2 permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan sistem *Online Single Submission* di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Ilir.
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala para pelaku usaha di kabupaten Ogan Ilir dalam pembuatan surat izin usaha perdagangan melalui website *Online Single Submission* (OSS) ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui dan menjelaskan Implementasi website *Online Single Submission* (OSS) dalam perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.
2. Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kendala pengimplementasian website *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.

## **1.4 Manfaat**

### **1.4.1 Secara teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi seluruh *civitas akademika* jurusan Ilmu Administrasi Publik untuk pengembangan

implementasi kebijakan yang menggunakan teknologi.

#### **1.4.2 Secara praktis**

Secara praktis penelitian ini menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi praktisi dan staf (DPMPTSP) kabupaten Ogan Ilir dalam rangka penerapan implementasi website OSS untuk memperlancar perizinan usaha bagi masyarakat pelaku usaha di kabupaten Ogan Ilir.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Bungin, Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group

Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika

Koentjoro. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika

Moleong. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset

Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: ALFABETA, cv

Nugroho, Riant. 2018. Public Policy Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik. Bandung: ALFABETA, cv

Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta. PT Bumi Aksara Sugiyono. 2017.

Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA, cv

### **Jurnal Dan Skripsi :**

Peraturan Pemerintah: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

### **Jurnal Dan Skripsi:**

Anggraini, Novida. 2018. Implementasi Perizinan Pembuatan Surat Izin Usaha

Perdagangan Secara Elektronik Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Jurnal Administrasi Publik, Vol.2 No.2

Sumarjono. dkk. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Kudus. Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Anugrah, Nurhamim. 2018. Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kota Palembang. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

Kinerja, wacana 2019 menerka implementasi kebijakan keselamatan dan kesejahteraan indonesia

**Internet:**

*<https://www.inews.id/finance/makro/sistem-oss-masih-banyak-kendala-terutama-sinkronisasi-daerah-dan-pusat> (Diakses pada juni 2024)*

*<https://id.wikipedia.org/wiki/kabupatenoganilir> (Dikutip pada juni 2024)*